



LAPORAN TAHUNAN
RAPAT EVALUASI KINERJA
DAN PEMBINAAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
PROVINSI NTT

BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkatNya kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat khususnya telah menyelesaikan penyusunan Laporan Tahunan 2023 ini sesuai dengan yang direncanakan. Laporan Tahunan Rapat Evaluasi dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Disadari dalam penyusunan Laporan Tahunan ini, masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu segala usul saran sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada bagian, sub bagian beserta staf yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa memberkati dan menuntun kita. Terima Kasih.

Kupang, 29 Desember 2023



Drs. ALEXANDER B. KOROH, MPM
PEMBINA TK.I
NIP 197004271990031005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Tujuan dan Saran	2
1.1.2 Tujuan	2
1.1.2 Saran	2
1.1.3 Dasar Pelaksanaan	2
1.1.4 Hasil Yang Diharapkan.....	2
Bab II Pelaksanaan	3
2.1 Waktu dan Tempat.....	3
2.2 Narasumber	3
2.3 Peserta.....	3
2.4 Pembiayaan.....	3
Bab III Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dan Pembinaan BUMD	
3.1 Rapat Pembinaan dan Evaluasi yang Pertama	4
3.1.1 Pembukaan.....	4
3.1.2 Pemaparan Materi	4
3.1.3 Diskusi dan Tanya Jawab	7
3.2 Rapayt Pembinaan dan Evaluasi yang Pertama.....	9
3.2.1 Pembukaan.....	9
3.2.2 Pemaparan Materi	9
3.2.3 Diskusi dan Tanya Jawab	14
3.3 Rapat Pembinaan dan Evaluasi yang Pertama.....	15
3.3.1 Pembukaan.....	15
3.3.2 Pemaparan Materi	15
3.3.3 Diskusi dan Tanya Jawab	20
Bab IV Hasil Yang Dicapai	22
4.1 hasil rapat pertama	22
4.2 hasil rapat kedua	23
4.3 Hasil rapat ketiga	24
Bab V Penutup	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didasarkan pada Undang-Undang dan peraturan diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah khususnya Bab XII dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Dengan landasan hukum ini BUMD berpeluang memperluas pasar, kemudahan mengakses informasi global, dan melakukan efisiensi.

BUMD harus bertransformasi dalam menghadapi perubahan secara global untuk menjadi kekuatan di daerah sehingga perlu bersinergi dengan badan dan lembaga lainnya, dengan harapan perusahaan BUMD dapat memberikan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peranan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga penting dalam percepatan pembangunan perekonomian daerah dan juga tuntutan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan berupa deviden dari Badan Usaha Milik, dalam rangka mewujudkan tujuan ini dibutuhkan berbagai kebijakan yang dapat mendorong terwujudnya peran BUMD, hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah sebagai pemegang otoritas dan regulator ekonomi.

Pemerintah berkewajiban mengatur berbagai hal yang terkait dengan regulasi dibidang ekonomi yang menjadi acuan bagi semua *stakeholder* termasuk BUMD untuk mengelola potensi daerah melalui kegiatan-kegiatan ekonomi yang di dukung dengan kelembagaan yang berdaya saing dan perencanaan yang terarah sebagai pemberi arah pembangunan ekonomi serta dilandasi dengan cara berpikir global dan bertindak lokal (*Thing Globaly and Action Localy*) disesuaikan dengan potensi dan peluang ekonomi, sosial budaya daerah. BUMD juga merupakan bagian dari organ Pemerintah Daerah, maka pada era Otonomi Daerah, selain memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing, juga memberikan kesempatan kepada

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola potensi-potensi bisnis yang ada di daerah.

Keberhasilan BUMD diukur berdasarkan kinerja dan memakai ukuran/prinsip manajemen keuangan yang sehat. Sehingga manajemen pengelolaan BUMD harus sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Peningkatan manajemen Badan Usaha Milik Daerah adalah upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang perlu mendapatkan perhatian khusus agar kinerja Badan Usaha Milik Daerah melaksanakan kegiatan usahanya secara profesional dan dapat menciptakan deviden yang positif untuk kelangsungan aktivitas usaha perusahaan maupun dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu komponen terpenting sumber pembiayaan pembangunan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), komponen inilah yang kiranya perlu digali dan dikelola secara lebih efisien dan efektif agar semakin kuat perannya dalam memperkecil ketergantungan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat dibidang pembiayaan pembangunan.

Kehadiran BUMD merupakan salah satu solusi untuk mengatasi angka pengangguran, namun demikian penyerapan tenaga kerja harus melalui seleksi yang ketat, membutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas handal dan tangguh mampu diemban guna mencapai tujuan perusahaan yang dapat menghasilkan deviden. Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah diharapkan pemerintah selalu mendukung, memotivasi, atau merangsang sehingga dengan demikian pertumbuhan dan perkembangan Badan Usaha Milik Daerah merupakan harapan baru bagi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah serta dapat mengurangi kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. BUMD selain sebagai salah satu pos penyumbangan PAD juga berperan penting sebagai penggerak roda perekonomian daerah, BUMD pada era Otonomi Daerah juga mempunyai peran dan fungsi vital karena dipandang sebagai pilar dan tulang punggung perekonomian daerah.

1.2 Tujuan dan Sasaran

1.2.1 Tujuan

- a. Koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan pengelola BUMD;
- b. Terevaluasinya pelaksanaan pengelolaan BUMD di Provinsi NTT;
- c. Merumuskan solusi pemecahan masalah dan rencana tindak lanjut terkait pengelolaan BUMD;
- d. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan BUMD dalam pengelolaan perusahaan yang baik serta untuk mendukung tujuan perusahaan dalam meningkatkan kemampuan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta dalam memperoleh laba yang optimal;
- e. Meningkatkan kinerja BUMD dan usaha daerah dalam kontribusinya terhadap PAD dan sebagai penggerak roda perekonomian di daerah.

1. Sasaran

4 (empat) BUMD Provinsi NTT, PT. BPD NTT, PT. Jamkrida NTT, PT. Flobamor, PT. Kawasan Industri Bolok.

1.3 Dasar Pelaksanaan

Dokumen Penyelenggaraan Anggaran Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.

1.4 Hasil Yang Diharapkan

1. BUMD dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan mengambil peran dalam meningkatkan ekonomi rakyat;
2. BUMD meningkatkan kinerja perusahaan sehingga memperoleh laba perusahaan sehingga dapat berkontribusi dalam penyeteroran Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan berupa deviden dari Badan Usaha Milik.

BAB II

PELAKSANAAN

2.1 Waktu dan Tempat

Evaluasi dan Pembinaan BUMD Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan sebanyak 3 kali :

Hari/Tanggal : - Kamis, 19 Januari 2023 dan Jumat, 27 Januari 2023
- Selasa, 26 Juli 2023
- Selasa, 19 Desember 2023

Tempat : - Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi NTT dan Ruang Kerja Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Prov NTT Lt. 1 dan Lt.2 Gdg Sasando Kantor Gubernur Jl. El Tari No. 52 Kupang
- Ruang Rapat Asisten, Lantai 2 Gedung Sasando, Jln. Raya El-Tari Nomor : 52 Kupang.
- Ruang Rapat Asisten, Lantai 2 Gedung Sasando, Jln. Raya El-Tari Nomor : 52 Kupang.

2.2 Nara Sumber

1. Sekretaris Daerah Provinsi NTT
2. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT

2.3 Peserta

Peserta rapat 25 (dua puluh lima orang) orang terbagi dalam dua kali pertemuan

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT;
2. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT;
3. Kepala Bapelitbangda Provinsi NTT;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT;

5. Direktur dan Komisaris PT Bank NTT;
6. Direktur dan Komisaris PT Flobamor;
7. Direktur dan Komisaris PT Jamkrida;
8. Direktur dan Komisaris PT Kawasan Industri Bolok.

2.4 Pembiayaan

Dibebankan kepada Anggaran Biro Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan Setda Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.

BAB III
MEKANISME PELAKSANAAN
EVALUASI KINERJA DAN PEMBINAAN BUMD
PROVINSI NTT

Kegiatan Rapat Pembinaan Evaluasi Kinerja dan Pembinaan BUMD Provinsi NTT dilaksanakan 3 kali yaitu :

3.1 Rapat Pembinaan Evaluasi Kinerja dan Pembinaan BUMD yang Pertama

3.1.1 Pembukaan

Rapat Pertama dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT sebagai pimpinan rapat dan selanjutnya rapat dipandu oleh Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan ;

3.1.2 Pemaparan Materi

1. PT. Bank Pembangunan Daerah NTT

Direktur Teknologi Informasi dan Operasional (Hilarius Minggu)

➤ **Capaian Kinerja**

- Aset tahun 2022 adalah sebesar Rp 17.008.000.000.000,- sedangkan asset di tahun 2021 adalah sebesar Rp 15.007.000.000.000,- dengan pertumbuhan asset 8.5%;
- Kredit 2021 Sebesar Rp 11.001.000.000.000,- , Tahun 2022 sebesar Rp 11.008.000.000.000.- dengan pertumbuhan 5.67%;
- Dana tahun 2021 sebesar Rp 12.005.000.000.000,-, tahun 2022 Rp 12.007.000.000.000,-dengan pertumbuhan 2.34%;
- Modal disetor tahun 2021 sebesar Rp 1.007.000.000.000,-, tahun 2022 Rp 1.009.000.000.000,- dengan pertumbuhan 12.72 %;
- Laba tahun 2021 sebesar Rp 334.000.000.000,-, tahun 2022 Rp 337.000.000.000,-, dengan penurunan sebesar 2 % karena Program Restrukturasi Kredit atas kebijakan Pemerintah Pasca Covid yaitu Usaha-usaha yang terdampak Covid-19 untuk tidak ditagih bunga dan Pemerintah mengizinkan usaha-usaha tersebut untuk menunggak pembayaran kredit;
- Digitalisasi PT BPD NTT senilai Rp 35.000.000.000,-
- Modal disetor Pemerintah Provinsi NTT sebesar Rp 525.000.000.000,- dan secara umum Rp1.982.000.000. dengan 2 Kabupaten yang belum

setor yaitu Kabupaten TTS dan Kabupaten Manggarai Timur dengan Total setoran Modal Rp 171.000.000.000,-

- Tercatat Modal inti minimum saat ini Rp 2.000.336.000.000.000,-
- Deviden Rp 2.002.000.000.000,-

➤ Rencana Kerja

- Peningkatan Kredit sebesar 8 %
- Peningkatan Dana sebesar 6.68 %
- Peningkatan Laba sebesar 4.79 %. (*Materi Terlampir*)

2. PT. Jamkrida

Direktur Utama PT. Jamkrida NTT (Ibrahim Imang, SE)

➤ Target dan capaian kinerja

Presentase Pencapaian Aset adalah sebesar 92,31% serta total Deviden yang disetor dengan rincian :

- Total Deviden yang sudah disetor ke KasDa sampai dengan TB. 2021 sebesar 17.226 juta.
- Laba Bersih TB 2022 sebesar 12.951 juta dengan Deviden 6.476 juta.

➤ Kinerja Penjaminan tahun 2022 Sebesar Rp 5.000.270.000.000,-

➤ Resmi menggunakan Logo Baru

➤ Perkembangan Terjamin Pelaku UMKM Sebagai salah satu BUMD dalam menjalankan peran bagi pengembangan pelaku UMKM, selama kurun waktu tahun 2015 hingga periode tahun 2022 terdapat **47.412** Terjamin yang merupakan pelaku UMKMK Produktif yang mendapat jaminan usaha baik atas fasilitas pinjaman kredit oleh perbankan maupun dalam jaminan kegiatan proyek

➤ Target Rp 25.000.000.000,- dengan claim yang diajukan sebesar Rp 19.000.000.000 dengan tingkat penilaian OJK PT Jamkrida Sangat Sehat

➤ Target Penjaminan Rp 6.000.000.000.000,-

➤ Kredit Merdeka adalah 100% dijamin oleh PT Jamkrida

➤ Deviden PT Jamkrida yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah adalah sebesar 50 % karena PT Jamkrida perlu mencadangkan 25 % dari Deviden.

➤ Kantor Baru PT Jamkrida akan direskinkan pada tanggal 23 Maret tahun 2023

➤ Rencana RUPS akan dilaksanakan pada tanggal 23 Febuari 2023. (*Materi Terlampir*)

3. PT. Flobamor NTT

Direktur Utama (Agustinus Z. Bokotei)

➤ Capaian Kinerja

- Total Modal sebesar Rp. 19.426.813.000,-
- Total Pendapatan tahun 2022 sebesar Rp 20.825.890.220,-
- Modal disetor sebesar Rp 2.000.000.000,-

- Adanya kelonggaran penerapan PPKM akibat COVID-2019 menyebabkan mulai terjadi peningkatan produksi penjualan tiket dari 5.937 lembar tiket menjadi 10.397 lembar tiket, atau terjadi peningkatan sebesar 75,12%, namun terjadi adanya kenaikan BBM
 - Kendala yang dihadapi
 - Beban Angsuran Pokok dan Bunga sebesar ± Rp. 130 juta per-bulan di PT BPD NTT atas pinjaman kredit Rp. 10 miliar (Akta Kredit per 08 Agustus 2016) atas pembangunan perumahan;
 - Pengelolaan Plago Hotel di Labuan Bajo belum bisa dilakukan karena terkendala HGB masih atas nama pengelola sebelumnya;
 - Adanya kebijakan PPKM akibat COVID-2019 berimbas pada tingkat keterisian di Hotel Sasando, ditambah lagi terjadinya Badai Seroja yang mengakibatkan kerusakan pada sarana dan prasarana di Hotel Sasando;
 - Kondisi Kapal KMP Ile Boleng yang masih rusak belum dilakukan perbaikan dari Kementerian Perhubungan sebagai pemilik kapal menyebabkan KMP Ile Boleng belum bisa beroperasi;
 - Kenaikan Harga BBM berdampak pada pencapaian laba perusahaan.
 - Target Tahun 2023
 - Mengupayakan kenaikan subsidi kapal tahun 2023 sebesar Rp. 3 milyar;
 - Mengembangkan jaringan kerja sama dengan BUMD DKI Jakarta dalam bidang perdagangan sapi dan daging beku;
 - Mengembangkan usaha di Taman Nasional Komodo;
 - Memaksimalkan Pengelolaan Hotel Sasando dalam pencapaian target pendapatan;
 - Membangun pola kemitraan dengan perusahaan pihak ke-3 (perusahaan/koperasi) dalam upaya menjalankan kegiatan usaha lain.

(Materi Terlampir)
4. PT. Kawasan Industri Bolok
- Direktur Utama PT. KI- Bolok (Dipl. Ing.Gabriel Kennenbudi)
- Realisasi dana Penyertaan Modal

Rencana Penambahan Dana Penyertaan Modal pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.000.000.000,- tidak terealisasi sampai saat ini.
 - Gambaran Kinerja PT Kawasan Industri Bolok

Kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2022

 - Pematangan lahan sebesar 84,260 m²;
 - Identifikasi lokasi pembangunan Pelabuhan Perikanan Terintegrasi (Program Kementerian Kelautan dan Perikanan RI) Tindak lanjut adalah

menunggu keputusan Pemerintah Daerah dalam hal alokasi dana untuk pembebasan lahan seluas 21 Ha karena yang dibutuhkan Pemerintah Pusat adalah status lahan dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi NTT ke Pemerintah Pusat ;

- Telah dilakukan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Pejabat Kepala Bapelitbangda yang kesimpulannya akan memberikan telaah ke Bapak Gubernur agar tahun 2023 dapat disiapkan dana pada APBD Perubahan untuk pembebasan lahan dimaksud;
 - Telah dilakukan tanda tangan Perjanjian Kerja Sama Sewa Lahan dengan 2 investor yaitu PT.Ecomec Resources Indonesia Tanggal 4 April 2022 dan PT.Gulf Mangan Group tanggal 14 November 2022;
 - Pembangunan Gedung Kantor PT.KIB telah selesai yang dilakukan tahun 2022 dan serah terima pertama (PHO) pada tanggal 3 November 2022;
 - Penyelenggaraan *road race* dalam rangka promosi PT.KIB yang kegiatan Pembukaan dan Penutupan oleh Bapak Wakil Gubernur NTT Animo peserta *road race* datang dari hampir seluruh wilayah NTT dengan jumlah pembalap starter 300 orang dengan 23 klas yang dipertandingkan dengan pembalap yang berasal dari wilayah NTT 296 orang dan dari luar wilayah NTT 4 orang dan animo masyarakat Bolok dan sekitarnya dalam rangka memanfaatkan moment ini telah berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat dengan berjualan makanan maupun minuman;
 - Untuk penyelenggaraan kegiatan *road race* PT.KIB memanfaatkan fasilitas jalan dalam Kawasan yang sudah ada dengan sedikit memodifikasinya sehingga menjadi *circuit* yang layak untuk balapan, tanpa perubahan pada DED yang sudah ada untuk PT KIB. Pembangunan *circuit road race* maupun penyelenggaraan *road race* hanya semata-mata langkah kongkrit untuk mempromosikan PT. KIB dan tidak merubah statusnya;
 - Telah dibuatkan dokumen perencanaan detail Gudang dan Pabrik Siap Pakai oleh Konsultan Perencana.
- Pendapatan Tahun 2022
- Pendapatan dari usaha sewa lahan adalah sebesar Rp.1.164.417.560,- dan pendapatan dari usaha lain termasuk Penyelenggaraan *road race* adalah sebesar Rp. 150.756.000,- (**Materi Terlampir**)

3.1.3 Diskusi dan Tanya Jawab

- Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur (Ganef Wurgiyanto, A.Pi)

1. PT KIB Terkait pembebasan lahan yang ada di kawasan industri bolok perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi NTT melakukan pembebasan lahan yang belum dilakukan Pemerintah dengan masyarakat yang ada di kawasan industri bolok;
 2. Kepastian pembebasan lahan PT KIB perlu dikaji lebih lanjut terkait yang berwenang untuk menindaklanjuti masalah tersebut;
 3. Terkait *road race* perlu ditingkatkan sesuai standar yang ada;
 4. Diharapkan PT KIB bersurat Terkait pameran pembangunan agar dapat ditindaklanjuti;
 5. Pelunya dukung Pemerintah Daerah dan PT BPD sebagai mitra sehingga melakukan penjaminan di PT Jamkrida;
 6. Mempersiapkan Peresmian dan penempatan kantor PT Jamkrida yang baru dengan baik;
 7. kerja sama PT Flobamor bersama BUMD DKI dalam bentuk pengiriman sapi hidup dan daging beku, dimana PT Flobamor mengajukan permintaan penambahan kuota pengiriman, terkait dengan hal tersebut PT Flobamor harus mengirimkan data lengkap yang ditujukan kepada Gubernur cq. Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT sehingga berdasarkan data tersebut permohonanya akan dipertimbangkan;
 8. PT BPD meningkatkan ekosistem perbankan baik dari sisi Kerjasama dengan masyarakat, Kerjasama OPD maupun dengan investor sehingga dapat mempercepat peningkatan perekonomian masyarakat
 9. Kendala Plago Hotel di Labuan bajo PT Flobamor harus segera diselesaikan;
 10. Terkait dengan keterlambatan pengadaan beras bulan Januari 2023 untuk ASN di lingkup Pemerintah Provinsi NTT, PT Flobamor harus membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi keterlambatan untuk bulan-bulan kedepannya, serta memanfaatkan beras lokal untuk menanggulangi tantangan alam dan harus ada dokumentasi;
 11. Kerusakan Sarana dan Prasarana pada Hotel Sasado perlu segera di tindaklanjuti dengan meningkatkan marketing dan kerja sama dengan OPD agar mengoptimalkan pemanfaatan Aset Hotel Sasando;
 12. Masih menunggu anggaran APBN untuk perbaikan KMP Ile Boleng;
 13. Adanya temuan BPK terkait KMP Sirung;
 14. Penyesuaian Anggaran dengan Pendapatan serta dampak dari kenaikan harga BBM pada PT Flobamor NTT.
- Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur (Dr.Drs. Jusuf L. Rupidara, M.Si)

1. Rencana Bisnis dari masing-masing BUMD menjadi perhatian dengan Penataan organisasi BUMD perlu meningkatkan koordinasi, Efisiensi dan Integrasi Kembali dalam standar korporate yang ada;
 2. Seluruh BUMD perlu meningkatkan daya tahan dalam menghadapi kesulitan (*Adversity Edurance*) dengan Produktifitas dan Efisiensi sehingga dapat memperbaiki Pertmbuhan yang mengalami penurunan biasanya 5% menjadi 3.5% dan Provinsi NTT dengan inflasi tertinggi nomor 5 nasional, Jambu mente nomor 1 nasional, kopi nomor 9 nasional, garam nomor 7 nasional, babi nomor 1 nasional, kakao nomor 10 dan rumput laut nomor 2 menjadi focus utama dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian Provinsi NTT ;
 3. Digitalisasi dalam penerapannya pada BUMD, dengan produk ekonomi kreatif dari berbagai permainan, arsitektur, interior, *music*, senirupa, desain *product, fashion*, kuliner, film dan animasi, *photography*, desain komunikasi, radio pintar, kriya, iklan, seni pertunjukan, *publication* dan macam-macam aplikasi agar menjadi perhatian masing-masing BUMD untuk turut mendukung 17 sektor ekonomi kreatif sesuai dengan *core bussines* masing-masing;
 4. Arahan Gerakan pengendalian inflasi sesuai surat edaran Gubernur dengan berjalan kaki, menggunakan kendaraan umum, memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami tanaman 100 hari.
- Kasubid. Akuntansi Pendapatan, Piutang & Penerimaan Pembiayaan Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT (Hilarius B.C.Da Silva, SE, M.Ec.Dev)

Terkait penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT KIB sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2020 yaitu sebesar Rp 23,750.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 2.000.000.000,-, Tahun 2021 sebesar Rp 35.000.000.000 dengan Realisasi Rp 20.000.000.000,- , Tahun 2022 sebesar Rp 20.000.000.000,-, dan untuk tahun 2023 sebesar Rp 16.250.000.000,- dengan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Terkait Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi NTT pada PT Jamkrida sesuai dengan Perda Nomor 5 tahun 2020 Tentang penambahan penyertaan modal Pada PT Penjamin Kredit Daerah NTT (PT Jamkrida NTT) yaitu berakhir ditahun 2022 sehingga apabila akan memberikan penyertaan modal Kembali kepada PT Jamkrida NTT perlu dibuat Perda yang baru sebagaimana catatan evaluasi Kementerian dalam Negeri untuk BUMD bilamana membuat Perda penyertaan modal maka tidak dengan menyebut besaran pertahun anggaran tetapi angka nominal sehingga lebh *flexible* dengan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

3.2 Rapat Pembinaan Evaluasi Kinerja dan Pembinaan BUMD yang Kedua

3.2.1 Pembukaan

Rapat Kedua dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTT sebagai pimpinan rapat dan selanjutnya rapat dipandu oleh Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

3.2.2 Pemaparan Materi

1. PT. Jamkrida NTT

Direktur Utama PT. Jamkrida NTT (Ibrahim Imang, SE)

- Progres pembangunan kantor sampai saat ini telah mencapai 20%, target selesai pembangunannya tanggal 3 November 2022.
- PT. JAMKRIDA NTT di tahun 2021 memperoleh penghargaan prestisius berupa penobatan sebagai salah satu BUMD terbaik di seluruh Indonesia dengan gelar “Top BUMD Award 2021 dengan perolehan Bintang 3” yang diselenggarakan oleh majalah bisnis terkemuka di Indonesia yaitu “Majalah Top Business” dan pada awal tahun 2022 PT. JAMKRIDA NTT kembali mendapatkan beberapa penghargaan yakni Top BUMD Award 2022 dengan perolehan Bintang 4, TOP CEO BUMD kepada Direktur Utama Bapak Ibrahim Imang dan TOP Pembina BUMD kepada Gubernur NTT Bapak Viktor Bungtilu Laiskodat.
- Rencana pengajuan inovasi pengajuan ijin usaha Asuransi Aset yang masih belum disetujui OJK.
- Kinerja Keuangan

Hal-hal yang perlu dilaporkan adalah sebagai berikut :

- Catatan Laba (setelah pajak) Tahun 2021 sebesar Rp12.013 Juta, mengalami kenaikan sebesar 33% jika dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp 9.018 Juta
- Total Aset Tahun 2021 mencapai Rp199.879 Juta, meningkat sebesar 19% jika dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp167.356 Juta
- Nilai Penjaminan sampai dengan Desember 2021 adalah sebesar Rp4.247 Miliar, mengalami peningkatan sebesar 17% jika dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp3.623 Miliar
- Progres kinerja per triwulan II (juni 2022) Aset dengan presentase pencapaian per Juni 2022 sebesar 81,27%
- Progres kinerja per triwulan II (juni 2022) Modal dengan presentase pencapaian per juni 2022 sebesar 83,36%
- Progres kinerja per triwulan II (juni 2022) Ekuitas dengan presentase pencapaian per juni 2022 sebesar 83,30%
- Progres kinerja per triwulan II (juni 2022) Laba dengan presentase pencapaian per juni 2022 sebesar 63,85%

- Nilai Penjaminan, proyeksi pencapaian per triwulan II (juni 2022) telah mencapai 87,15%
 - Nilai Terjamin, proyeksi pencapaian per triwulan III (juni 2022) telah mencapai 104,41%
 - Pemeriksaan Kinerja Keuangan
 - PT. Jamkrida telah diperiksa oleh 4 (empat) Badan/Lembaga/Instansi terkait yakni, OJK, BPK, Konsultan Publik dan Inspektorat dan hasil pemeriksaan tersebut PT. Jamkrida dinyatakan kondisi kinerja keuangan sangat sehat dengan Nilai 1.40.
 - Berdasarkan nilai *Gearing Ratio* Penyelegaraan penjamin sebesar 40 kali dari modal sebesar 5 Triliun 170 Milyar Rupiah dengan posisi Nilai Penjamin pada Juni 2022 adalah sebesar Rp. 4.364.571.968.551 (*Materi terlampir*).
2. PT. Flobamor
Direktur Utama PT. Flobamor (Agustinus Bokotei)
- Capaian Kinerja
 - Kendala Pendapatan dari penjualan tiket menurun karena terjadi penurunan jumlah penumpang hingga 40,7% , hal ini dikarenakan adanya kebijakan PPKM akibat COVID 2019;
 - Pendapatan bersih hasil usaha Rp 749.244.823;
 - Grand total penjualan tiket kapal 15.962.
yang dihadapi dalam pencapaian target tahun 2021:
 - Strategi yang telah dilakukan 2021
 - Menyelesaikan sisa trip kapal tahun 2021 sesuai kontrak subsidi;
 - Terlaksananya kerja sama perdagangan sapi hidup dengan BUMD DKI Jakarta;
 - Berupaya melakukan penjualan terhadap aset tanah atau kerjasama pembangunan Perumahan untuk melunasi pinjaman di BPD NTT;
 - Membangun pola kemitraan dengan perusahaan pihak ke-3 (perusahaan/koperasi) dalam upaya menjalankan kegiatan Usaha Lain;
 - Bersinergi dengan Dinas PUPR dan Kontraktor Pembangunan Jalan untuk mensupply kebutuhan Aspal dan Soil Additif;
 - Kerja sama dengan BUMD DKI untuk pemenuhan kebutuhan daging sapi di Pemerintah Provinsi DKI;
 - Menjual aset tanah untuk melunasi pinjaman di Bank NTT;
 - Peningkatan pendapatan dari supply beras ASN Pemprov NTT;
 - Membangun kerjasama dengan koperasi dalam upaya menjalankan kegiatan Usaha Lain.
 - Peluang Bisnis

- Fokus pada usaha aspal dan aditif soil, ternak sapi dan beras, merupakan usaha yang prospektif merupakan peluang bisnis yang sangat menjanjikan dalam peningkatan laba perusahaan;
 - Status KMP Ile Boleng rusak, sedang menunggu perbaikan dari Kementerian Perhubungan mengalami kendala anggaran yang di refofusing.
 - Anak Perusahaan PT. Flobamor
 - Pembubaran anak perusahaan PT. Flobamor akan menimbulkan masalah baru bagi PT. Flobamor terkait beban utang anak perusahaan sebesar 3 M yang akan menjadi beban utang PT. Flobamor;
 - Akan melakukan audit tujuan tertentu terhadap anak perusahaan yang merupakan solusi terbaik bagi PT. Flobamor.
 - Kendala yang dihadapi
 - Beban Angsuran Pokok dan Bunga sebesar Rp. 130 juta per bulan di BPD NTT atas pinjaman kredit Rp. 10 miliar (akta kredit per 08 Agustus 2016);
 - Adanya kebijakan PPKM akibat COVID-2019 menyebabkan terjadi penurunan produksi penjualan tiket dari 10.025 tiket menjadi hanya 5.937 lembar tiket, atau terjadi penurunan sebesar 40,7%;
 - Pengelolaan Plago Hotel di Labuan Bajo belum bisa dilakukan karena terkendala HGB masih atas nama pengelola sebelumnya;
 - Adanya kebijakan PPKM akibat COVID-2019 berimbas pada tingkat keterisian di Hotel Sasando, ditambah lagi terjadinya Badai Seroja yang mengakibatkan kerusakan pada sarana dan prasarana di Hotel Sasando;
 - Kondisi Kapal KMP Ile Boleng yang masih rusak belum dilakukan perbaikan dari Kementerian Perhubungan sebagai pemilik kapal menyebabkan KMP Ile Boleng belum bisa beroperasi. (*Materi terlampir*).
3. PT. Kawasan Industri Bolok
Direktur Utama PT. KI- Bolok (Gabriel Kenenbudi)
- Penggantian Komisaris Utama
 - Penggantian Komisaris Utama PT. Kawasan Industri Bolok sedang dalam proses oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT;
 - PT. Kawasan Industri Bolok seluruhnya masih merupakan saham tunggal dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - Progres Pembangunan Kantor PT. Kawasan Industri Bolok
 - Sudah melakukan tender pembangunan pada bulan Juli, namun masih ada pertimbangan oleh Irjen Depdagri sambil menunggu penetapan Perda Penyertaan Modal (aset);

- Sesuai Perda nomor 6 tahun 1997 tentang Pengelolaan Kawasan Industri Bolok, luas Kawasan Industri Bolok 900 hektar dan tersebar di 4 hamparan namun dari 4 hamparan tersebut baru hamparan I seluas 203 hektar telah memiliki sertifikat HPL sedangkan sisanya belum bersertifikat (Belum dilakukan pembebasan oleh Pemerintah Daerah);
 - Walaupun hamparan I telah memiliki sertifikat HPL dengan asumsi bahwa dengan keluarnya sertifikat oleh Negara (BPN) dianggap lahan tersebut telah clear and clean menjadi milik Pemerintah Provinsi NTT, namun kenyataannya masih saja ada masyarakat yang mengklaim bahwa lahannya belum diberikan kompensasi;
 - Sesuai rencana melalui PT. Sea Port bahwa pada hamparan III seluas 80 hektar akan dibangun New Kupang Port sebagai Pelabuhan Peti Kemas untuk mengantisipasi adanya ledakan peti kemas, namun lahan tersebut belum dilakukan pembebasan oleh Pemerintah Daerah;
 - Sesuai Perda nomor 6 tahun 1997 tentang Pengelolaan Kawasan Industri Bolok disebutkan bahwa terdapat 12 titik koordinat sebagai titik batas untuk memisahkan area Kawasan Industri dengan area permukiman masyarakat, namun kenyataannya titik-titik koordinat tersebut tidak diketahui dengan pasti dimana letaknya.
- Realisasi Rencana Bisnis dan realisasi RKAP
- Rencana pembangunan peti kemas dan perikanan dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan oleh badan/lembaga/instansi terkait maka melalui Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan akan berkoordinasi dengan Inspektorat dalam pembuatan pedoman pemeriksaan terhadap BUMD Provinsi NTT;
 - Pematangan muka lahan, telah dilakukan sesuai rencana seluas 13,26 Hektar;
 - Pembuatan pintu gerbang 1 paket, baru dibangun dalam bentuk gapura;
 - Membuat dokumen perencanaan pembangunan pabrik siap pakai. pembangunan fisik belum bisa dilakukan karena klaim masyarakat;
 - Pos penjagaan pintu masuk 1 unit, sudah selesai dibangun;
 - Pemasangan penerangan jalan umum 1 paket, telah dipasang 13 titik lampu;
 - Membuat dokumen perencanaan peningkatan jalan;
 - Pelaksanaan tender pembangunan gedung kantor PT. KIB akhir Desember 2021.
- Capaian Kinerja
- Pendapatan 2021 dan Potensi Pendapatan PT. Kawasan Industri Bolok
- Telah dilakukan penyelesaian dana konsinyasi yang dititipkan oleh PT.PLN UIP Nusa Tenggara di Pengadilan Oelamasi sebesar Rp.1.141.984.350,- sebagai dana kompensasi atas kabel SUTT yang

melintasi area Kawasan Industri Bolok. Dari dana tersebut 35% (Rp.399.694.250,-) dialokasikan sebagai tali asih kepada eks pemilik lahan sehingga dana bersih yang masuk untuk PT. Kawasan Industri Bolok adalah sebesar Rp.742.290.100,- dan Pendapatan dari jasa bank sebesar Rp.289.765.738, sehingga total pendapatan adalah sebesar Rp.1.032.055.838,-.

- Perpanjangan Kontrak PT. Gulf Mangan Grup yang jatuh tempo pada bulan November 2022 pada lahan seluas 10 ha dengan nilai per tahun sebesar Rp.762.604.642 selama 5 tahun sehingga menjadi Rp. 3.813.023.210,-
- Kontrak PT. Ecomec Resources Indonesia pada lahan seluas 1,40 Ha dengan nilai per tahun sebesar Rp. 117.441.114,- kontrak selama 5 tahun;
- Kontrak PT. PLN UIP Nusa Tenggara pada lahan yang dipakai untuk jalur SUTT dengan nilai per tahun sebesar Rp. 87.500.000,- dimulai bulan Juni 2022;
- PT. Jayatama Global Investment telah menyatakan minat untuk sewa lahan di KIB pada lahan seluas 5 Ha;
- PT. Gama Agro Investama juga menyatakan minat untuk sewa lahan di PT. KIB;
- Pendapatan lain yang dihasilkan dari event-event yang akan diselenggarakan oleh PT. KIB dalam Kawasan Industri Bolok (*Materi terlampir*).

3.2.3 Diskusi dan Tanya Jawab

- Arahan Sekretaris Daerah Provinsi NTT (Domu warandoy, SH.,M.Si)
 - Apresiasi dengan kinerja BUMD Provinsi NTT;
 - Kehadiran BUMD diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian masyarakat NTT serta pengadaan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan tata kelola Pemerintah Daerah sehingga dapat memperoleh keuntungan;
 - Membangun BUMD yang sehat, Berdaya saing dan Berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - Bertanggung jawab dan disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
- Arahan Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT (.Drs. Jusuf L. Rupidara, M.Si)
 - Hubungan Direksi dan komisaris sesuai dengan yang tertuang dalam PP Nomor 54 Tahun 2017;
 - Tanggapan fraksi terkait temuan BUMD harus segera ditindaklanjuti;

- PT. Flobamor harus mengurus klasifikasi baku pengembangan usaha baru agar dapat menjadi dasar dalam penguatan argumen.
 - Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Tw. 1 2022 menurun menjadi 1,62% disbanding Tw sebelumnya 3.10% yaitu 2% dibawah Nasional. Ini bersumber pada PMTB dan Lembaga Non Provit
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT (Odermaks Sombu, SH,MA,MH)
 - Pengalaman merupakan pelajaran berharga, untuk tidak mengulang lagi permasalahan dalam BUMD;
 - *Core business* yang dijalankan oleh masing-masing BUMD diharapkan dapat menyumbangkan PAD bagi Pemerintah Provinsi NTT;
 - BUMD diharapkan Selalu berkoordinasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi NTT terkait dengan masalah dalam BUMD yang dapat ditangani sesuai dengan tupoksinya.
 - Kepala Bagian pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT (Lukas N. Mau)
 - Terkait kinerja BUMD yang dikategorikan sehat pasti selalu berinovasi dalam melaksanakan Rencana Bisnisnya;
 - Apresiasi dengan BUMD yang tetap eksis ditengah krisis *covid-19*.
 - Kepala Bidang pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Domi D. Payong)
 - Aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dikelola oleh PT Flobamor, PT Jamkrida dan PT. Kawasan Industri Bolok harus dikelola secara optimal sehingga dapat memberikan deviden kepada Pemerintah Provinsi NTT;
 - Kreditur yang mengalami kredit macet akan di bayarkan oleh PT. Jamkrida;
 - Koordinator Substandi BUMD dan BLUD Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT (Patrisia A. D. Wea)
 - Audit terhadap BUMD yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT harus segera ditindaklanjuti.

3.3 Rapat Pembinaan Evaluasi Kinerja dan Pembinaan BUMD yang Ketiga

3.3.1 Pembukaan

Disampaikan oleh Plt. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya Koordinator Substansi BUMD dan BLUD memandu jalannya rapat.

3.3.2 Pemaparan Materi

1. Direktur Utama PT Jamkrida (Ibrahim Imang, SE)

- hasil penilaian dari Irjen Kemendagri RI atas PT. Jamkrida NTT yang dilakukan pada Mei 2023, PT. Jamkrida NTT dikategorikan sebagai BUMD dengan Tingkat Kesehatan “SEHAT”
- hasil penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan PT. Jamkrida NTT yang dilakukan sesuai dengan SEOJK Nomor : 18/SEOJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Lembaga Penjamin, PT. Jamkrida NTT berada pada kategori “SANGAT SEHAT” sejak tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022, sampai dengan tahun 2023 (30 November 2023)
- Tindak lanjut penyelesaian rekomendasi pemeriksaan atas PT. Jamkrida NTT yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi NTT, telah selesai ditindak lanjuti.
- Kinerja Keuangan Per-30 November 2023 VS Target 2023)

Lap. Keuangan	Target 2023	Per November 2023	Persentase Pencapaian
Asset	224.582.000.000	242.994.939.495	108,20%
Modal	129.250.000.000	129.250.000.000	100,00%
Ekuitas	156.536.000.000	155.745.557.957	99,50%
Laba	13.517.000.000	12.905.833.530	95,48%

- Kinerja Penjaminan (Per-November 2023) VS Target 2023

Klasifikasi	Target 2023	per November 2023	Persentase Pencapaian
Produktif	1.152.266.000.000	771.528.314.740	66,96%
Non Produktif	4.216.587.000.000	4.548.442.817.115	107,87%
Total	5.368.853.000.000	5.319.971.131.855	99,09%

- Mitra UMKMK , PT Jamkrida dalam menjalankan peran bagi pengembangan pelaku UMKMK , selama kurun waktu 2015 hingga bulan November 2023 terdapat 62.617 terjamin yang merupakan pelaku UMKMK produktif yang mendapat jaminan usaha baik atas fasilitas pinjaman kredit oleh Perbankan maupun jaminan dalam kegiatan proyek;
- Total setoran modal sampai dengan Tahun 2022 sebesar, Rp.129.000.000.000, bunga deposito digunakan untuk biaya operasional;

- Penyertaan Modal yang belum direalisasikan sesuai dengan Perda No. 4 Tahun 2022 yaitu Penyertaan Modal pada PT Jamkrida NTT pada Tahun 2022 sebesar Rp 25M, namun realisasinya hanya sebesar Rp 4M;
- Diharapkan agar, Penyertaan Modal dari Pemerintah Provinsi NTT kepada PT. Jamkrida NTT sebesar Rp 21M dapat segera terealisasikan.
(materi terlampir)

1. Direktur Utama PT, Kawasan Industri Bolok (Dipl. Ing. Gabriel Kennenbudi)
 - Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada PT. KI-Bolok sampai dengan Tahun 2023 sebesar Rp. 22.000.000.000;
 - Rencana Bisnis Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 telah melakukan kerja sama sewa lahan dengan 2 (dua) perusahaan yaitu:
 - PT. Gulf Mangan Grup
perusahaan yang bergerak dalam bidang smelter mangan, Kontrak Sewa Lahannya dari tahun 2022 sampai tahun 2027, lahan seluas 10 Hektar dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.813.023.210.
 - PT. Ecomec Resources Indonesia
PT. Ecomec Resources Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pencucian dan perdagangan mangan, kontrak kerja sama sewa lahan seluas 1,4 Hektar mulai tahun 2022 sampai tahun 2027 dengan nilai sewa sebesar Rp 587.205.570,-
 - Rencana bisnis tambahan yaitu pematangan lahan, pembangunan Gudang, pembangunan pabrik siap pakai, belum bisa terealisasi karena belum ada dana penyertaan modal tahun 2023 sebesar Rp. 16.250.000.000,-.
 - Target pendapatan sampai dengan 31 desember 2023, dari bisnis utama sewa lahan dan bisnis tambahan sebesar **RP. 1.430.072.272**;
 - Hak pengelolaan lahan PT. Kawasan Industri Bolok seluas 203 hektar telah memiliki sertifikat HPL sisanya seluas 160 hektar belum bersertifikat (Belum dilakukan pembebasan oleh Pemerintah Daerah) dan tanah seluas 36 hektar, Pemerintah Provinsi NTT kalah di perkara, hamparan I yang memiliki sertifikat HPL dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dianggap lahan tersebut telah clear and clean, namun masih ada beberapa masyarakat yang mengklaim bahwa lahannya belum diberikan kompensasi oleh Pemerintah Daerah sehingga ini merupakan hambatan bagi PT. KIB untuk melakukan pemetaan kawasan bagi calon investor yang ingin menyewa lahan untuk kegiatan usahanya;
 - Belum bisa dilakukan sewa lahan kepada investor, karena status lahan belum jelas;
 - Diharapkan Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Pendapatan dan Aset Daerah segera membentuk Tim Penelusuran Titik Koordinat agar mendapatkan Batas Kawasan Industri yang Pasti untuk menghindari adanya penyerobotan oleh masyarakat atau oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab;
 - Target Penyertaan modal daerah tahun 2023 terhadap PT KI-Bolok Rp.16.250.000.000,-. Namun sampai saat ini dana tersebut belum terealisasi sehingga dapat mengganggu rencana bisnis yang telah ditetapkan pada tahun 2023;

- Terkait Mess PLN di tanah Kawasan Industri Bolok, kontrak tanahnya dengan Pemerintah Daerah, pembangunan mess pihak PLN berhubungan dengan masyarakat, sehingga saat ini pihak PLN dipanggil untuk membuat kontrak dengan Pemerintah Provinsi;
- Dampak pandemi covid-19 yang mempengaruhi situasi ekonomi global, maka PT.KIB belum bisa menjalankan usaha bisnis secara maksimal seperti yang telah tercantum dalam Rencana Bisnis tahun 2022. Hal ini berakibat belum dapat menghasilkan profit yang maksimal sesuai yang diharapkan. Untuk membiayai beban Operasional perusahaan yaitu gaji, tunjangan, sewa gedung kantor PT. KIB dan biaya administrasi lainnya masih dibebankan sementara pada pos dana penyertaan modal. (*materi terlampir*).

2. Direktur Utama PT. Flobamor (Agustinus Z. Bokotei)

- Perubahan skema pembayaran Subsidi Usaha bidang penyeberangan dibandingkan dengan tahun sebelumnya kontrak lump-sum, pembayaran dilakukan setiap bulan, di tahun 2023 terjadi perubahan menggunakan kontrak harga-satuan real cost dan pembayaran per 4 dan 3 bulan Akibat perubahan Pelaksanaan berdampak pada penyerapan subsidi tidak optimal dan subsidi terserap Januari s.d November 2023 sebesar Rp 12 miliar dari total nilai kontrak 19 miliar, atau baru terserap 63%, Akibat penyerapan tidak optimal terjadi pemotongan Subsidi sebesar 4,1 milyar dan berdampak pada arus kas, hal ini dialami oleh seluruh operator penyeberangan perintis;
- Kapal KMP Ile Boleng dari tahun 2019 mengalami kerusakan dan untuk perbaikannya sampai saat ini masih menunggu keputusan dari Kementerian Perhubungan;
- Adanya dispute Hutang Piutang dengan ASDP belum terselesaikan;
- Adanya kenaikan harga beras di tingkat nasional pada awal tahun 2023 yang melebihi pagu anggaran yang diperoleh;
- Terjadi penurunan penjualan sapi dikarenakan dampak penyakit mulut dan kuku.
- Usaha Jasa Pemanduan Wisata di TNK yang berlaku saat ini hanya cukup untuk membiayai operasional;
- Usaha Hotel Sasando yang dikelola melalui anak perusahaan PT. Flobamorata Bangkit Internasional belum maksimal karena keterbatasan kemampuan keuangan perusahaan untuk melakukan perbaikan sarana fasilitas Hotel yang memerlukan modal kerja cukup besar ditambah lagi dengan adanya wabah Pandemi Covid-19 dan Badai Seroja yang mengakibatkan bertambahnya kerusakan pada Sarana Fasilitas Hotel tersebut.

- Biaya/Beban Pokok dan Bunga Bank 140jt/bulan atas pinjaman modal kerja sebesar 10 miliar pada bulan Agustus tahun 2016;
- Perusahaan telah berupaya melakukan Koordinasi dan Evaluasi melalui surat resmi dan secara langsung berdiskusi dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI untuk dapat dilakukan penyesuaian pelaksanaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati;
- Mengembalikan pengelolaan Kapal KMP Ile Boleng kepada Kementerian Perhubungan dan sampai saat ini masih menunggu keputusan dari Kementerian Perhubungan;
- Melakukan mediasi dan koordinasi dengan ASDP untuk penyelesaian;
- Usaha Sapi saat ini dihentikan sementara dan menunggu meredanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
- Perusahaan berupaya untuk koordinasi dan sosialisasi Bersama dengan Balai TNK dan pelaku pariwisata untuk tujuan menaikkan harga Tiket Jasa Pemanduan Wisata sebelumnya sebesar Rp. 120.000 dinaikan menjadi Rp. 225.000 dan sekaligus akan melakukan penerapan pembatasan pengunjung (daya dukung & daya tampung) di area Pulau Padar & Pulau Komodo;
- Usaha Hotel Sasando: Perusahaan telah mengajukan surat permohonan untuk mengakhiri Kerjasama dan secara paralel Perusahaan mencari pihak ketiga untuk melakukan kerjasama dan memohon dukungan Pemerintah Provinsi melakukan kegiatan di Hotel Sasando;
- Terhadap kendala lainnya, khususnya terkait Biaya/Beban Pokok dan Bunga Bank atas pinjaman modal kerja sebesar 10 miliar pada bulan Agustus tahun 2016, Perusahaan telah melakukan restrukturisasi penundaan pembayaran pokok pinjaman dan berupaya untuk melakukan penjualan Asset Tanah yang menjadi jaminan untuk melunasi hutang bank. *(materi terlampir)*

3. Pjs. Kadiv Supp. Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (Charles F. Caputz)

- Perkembangan UMKM

Pos - Pos Neraca Kredit UMKM	Target Anggaran Trw. IV – 2023	Realisasi		Pencapaian Nov 2023 Thd Angg. Trw. IV - 2023		% Kredit UMKM	
		Nov 2022	Nov. 2023	(+/-)	%	(+/-)	%
						2,514,595 2,401,059	
						2,659,612 145,017	
						105.77 258,553 10.77	
						Pos - Pos Neraca Realisasi Pencapaian Nov 2023 Thd Angg. Trw. IV - 2023 .	
Kredit UMKM	2,514,595	2,401,059	2,659,612	145,017	105.77	258,553	10.77

- Pola pendampingan UMKM
 - *Training & certivicated*
Membuat pelatihan bagi UMKM dan membantu dalam proses sertifikasi dan ijin (BPOM, HAKI, PIRT dan HALAL)
 - Market/Offtaker
Membantu dalam mencari market/offtaker untuk pelaku UMKM binaan PT BPD NTT
 - *Financing*
Memberikan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM sesuai ketentuan Bank yang berlaku.
- Program PT BPD NTT dalam mendukung transformasi UMKM yaitu Festival Desa Binaan Bank NTT dan Peduli UMKM (pendampingan, digitalisasi peningkatan kualitas dan inovasi);
- Modal Inti Bank per-November 2023 mencapai Rp. 2,263 triliun. Kekurangan Modal Inti Minimum dari target Rp. 3 triliun di tahun 2024 sebesar Rp. 736 miliar;
- Rencana pemenuhan Modal Inti Minimum (MIM) Rp. 3 T melalui KUB; (*materi terlampir*)
- Diharapkan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan membantu untuk memfasilitasi PT BPD NTT bertemu dengan Pj. Gubernur terkait dengan pemenuhan Modal Inti Minimum tahun 2024.

3.3.3. Diskusi dan Tanya Jawab

1. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Aleks Lelan)
 - Kondisi Keuangan Daerah belum memungkinkan untuk merealisasikan Penyertaan Modal terhadap 4 (empat) BUMD Provinsi NTT;
 - Segera berkoordinasi dengan Bappelitbangda terkait imreng tanah kantor PT Jamkrida;
 - Pengelolaan Hotel sasando disarankan untuk diserahkan kepada PT BPD NTT.
2. Kepala Sub Bagian pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT (Karel Eben)

Badan Pendapatan dan Aset Daerah bersama dengan Badan Pertanahan Nasional telah melakukan rapat koordinasi untuk menyelesaikan masalah tanah di Kawasan Industri Bolok. Terkait SK Tim Penelusuran Titik Koordinat saat ini sedang berproses di Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.
3. Plt. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Drs. Alexander B. Koroh, MPM)

- Tindak lanjut hasil pemantauan di PT Kawasan Industri Bolok yang telah dilaksanakan tanggal 12 Desember 2023, telah berkoordinasi dengan staf khusus bidang hukum untuk menyelesaikan masalah status tanah di Kawasan Industri Bolok;
- Segera mengumpulkan semua dokumen terkait status tanah di Kawasan Industri Bolok, setelah itu berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional selanjutnya dengan Satgas Percepatan Penyelesaian masalah tanah di pusat, diskusi akan terus dilakukan bersama Staf Khusus Bidang Hukum, perkembangannya akan selalu diikuti dan perkembangannya akan selalu diinformasikan kepada Direktur Utama PT KI-Bolok;
- Segera berkoordinasi dengan Staf Khusus Gubernur bidang Ekonomi untuk memfasilitasi PT BPD NTT beraudiens dengan Pj. Gubernur NTT terkait pemenuhan Modal Inti Minimum Tahun 2024, dimana sampai dengan bulan November 2023 mencapai Rp. 2,263 triliun. Kekurangan Modal Inti dari target Rp. 3 triliun di tahun 2024 sebesar Rp. 736 miliar.

BAB IV

HASIL YANG DICAPAI

4.1.1 Hasil yang dicapai dari Rapat Pertama :

1. PT Kawasan Industri Bolok

- Terkait pembebasan lahan yang ada di Kawasan Industri Bolok perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi NTT dalam melakukan pembebasan lahan yang belum dilakukan Pemerintah dengan masyarakat yang ada di Kawasan Industri Bolok;
- Pemerintah memberikan perhatian dan dukungan kepada PT. KIB untuk terus meningkatkan kinerjanya mengelola aset tanah Pemerintah (yang sudah HPL), guna menarik investor-investor luar untuk menanamkan modalnya di PT. KIB;
- Diharapkan kedepanya PT. KIB dapat berkontribusi PAD untuk Pemerintah.

2. PT Jamkrida

- Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada PT Jamkrida yang telah melakukan pendampingan penjamin kredit kepada 47.412 pelaku UMKM dari tahun 2015 s.d tahun 2022;
- Pemerintah terus memberikan dukungan terhadap kinerja PT Jamkrida;
- Rencana Peresmian dan penempatan kantor baru PT Jamkrida yaitu pada tanggal 23 Maret 2023 dan pelaksanaan RUPS TB. 2022.

3. PT BPD NTT

- Pemerintah memberikan apresiasi kepada PT BPD NTT yang telah melakukan kerja sama dan mendukung program-program strategis menuju NTT bangkit dan sejahtera;
- Penyertaan modal dari Kab/kota kepada PT BPD NTT per-31 desember 2022 sebanyak 21 (dua puluh satu) Kab/kota dan masih terdapat dua kabupaten yang belum menyetor penyertaan modalnya kepada PT BPD NTT yaitu kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Manggarai Timur. Hal ini menjadi perhatian serius Pemerintah untuk berkoordinasi dengan 2 (dua) kabupaten tersebut agar menganggarkan penyertaan modalnya pada APBD kabupaten tersebut;
- Perkembangan Modal inti minimum PT. BPD NTT per-31 desember 2022 meningkat sebesar Rp. 250 M (12 %);
- Pemerintah terus memberikan perhatian dan dukungan terhadap kerja keras PT BPD NTT untuk mencapai modal inti minimum pada Tahun 2024.

4. PT. Flobamor

- Asisten Perekonomian dan Pembangunan memberikan peringatan keras kepada Direksi PT Flobamor atas keterlambatan penyaluran beras bulan

Januari 2023 kepada ASN di lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan kualitas beras yang tidak memenuhi standar (beras berwarna kuning dan bergumpal), diharapkan menjadi perhatian PT Flobamor untuk bulan berikutnya agar tidak terulang lagi;

- Kerja sama PT Flobamor bersama BUMD DKI dalam bentuk pengiriman sapi hidup dan daging beku, dimana PT Flobamor mengajukan permintaan penambahan kuota pengiriman, terkait dengan hal tersebut PT Flobamor harus mengirimkan data lengkap yang ditujukan kepada Gubernur cq. Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT sehingga berdasarkan data tersebut permohonannya akan dipertimbangkan;
- Pengelolaan kapal penyeberangan yaitu: KMP Sirung, KMP Ile boleng dan KMP Pulau Sabu dapat disampaikan bahwa KMP Ile Boleng masih dalam perbaikan dan belum dapat beroperasi, sedangkan yang beroperasi KMP Sirung dan KMP Pulau Sabu, terkait usaha jasa penyeberangan sebagai *core business* perseroan selain memenuhi unsur legalitas tetapi juga sejalan dengan kekuatan sumber daya perseroan, sumber daya administrasi dan sumber daya manusia;
- Pengelolaan karcis masuk Taman Nasional Komodo (TNK) dikelola secara online (aplikasi INSA), namun masih disesuaikan dengan kebutuhan dan penambahan fitur-fitur yang ada pada aplikasi tersebut;
- Pemerintah terus memberikan perhatian dan dorongan guna perbaikan sarana dan prasarana serta tingkatkan marketing penjualannya (promosi) sehingga diharapkan pendapatan semakin meningkat;
- Pemerintah terus memberikan dukungan terhadap kinerja PT Flobamor.

4.2 Hasil yang dicapai dari Rapat Kedua:

1. Kepada PT. Jamkrida Pemerintah juga memberikan perhatian penuh terhadap kinerja baik yang telah dilakukan selama ini, diharapkan lebih selektif dalam memberikan jaminan kepada nasabah Bank maupun kepada pelaku pengadaan barang dan jasa, dan menjaga agar *gearing ratio* tetap stabil sehingga tidak terjadi resiko-resiko yang tidak diinginkan;
2. Pemerintah memberikan perhatian dan dukungan kepada PT. KIB untuk terus meningkatkan kinerjanya mengelola aset tanah Pemerintah guna menarik investor-investor luar untuk menanamkan modalnya di NTT;
3. Perhatian dan dukungan Pemerintah kepada PT. Flobamor terus diberikan, diharapkan PT. Flobamor dapat melakukan *roadmap core businessnya* dengan baik sehingga ada kontribusi terhadap PAD;
4. Penyertaan modal kepada BUMD yang tidak maksimal karena kondisi keuangan daerah menjadi perhatian Pemerintah sesuai aturan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.

4.3 Hasil yang dicapai dari Rapat Ketiga :

1. PT Jamkrida

- Sesuai kondisi Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2023 belum dapat merealisasikan Penyertaan Modal kepada PT. Jamkrida NTT;
- Pemerintah terus memberikan dukungan terhadap PT Jamkrida untuk terus meningkatkan kinerja keuangan sehingga tetap mempertahankan penilaian tingkat kesehatan dengan kategori sehat;
- hasil penilaian dari Irjen Kemendagri RI atas PT.Jamkrida NTT yang dilakukan pada Mei 2023, PT.Jamkrida NTT dikategorikan sebagai BUMD dengan penilaian Tingkat Kesehatan “SEHAT”
- Tindak lanjut penyelesaian rekomendasi pemeriksaan atas PT. Jamkrida NTT yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi NTT, telah selesai ditindaklanjuti.
- Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada PT Jamkrida yang telah melakukan pendampingan penjamin kredit kepada 62.617 pelaku UMKM selama kurun waktu 2015 hingga bulan November 2023.

2. PT. Kawasan Industri Bolok

- Sesuai kondisi Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2023 belum dapat merealisasikan Penyertaan Modal kepada PT. KI- Bolok;
- Badan Pendapatan dan Aset Daerah bersama dengan Badan Pertanahan Nasional telah melakukan rapat koordinasi untuk menyelesaikan masalah tanah di Kawasan Industri Bolok. Terkait SK Tim Penelusuran Titik Koordinat saat ini sedang dalam berproses di Badan Pendapatan dan Aset Daerah.
- PT. KI-Bolok segera mengumpulkan semua dokumen terkait status tanah di Kawasan Industri Bolok, dan akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional selanjutnya dengan Satgas Percepatan Penyelesaian masalah tanah di Jakarta, diskusi akan terus dilakukan bersama staf khusus bidang hukum, perkembangannya akan selalu diikuti dan akan selalu diinformasikan kepada Direktur Utama PT KI-Bolok;
- PT.KI-Bolok belum bisa menjalankan usaha bisnis secara maksimal seperti yang telah tercantum dalam Rencana Bisnis tahun 2022. Hal ini berakibat belum dapat menghasilkan profit yang maksimal sesuai yang diharapkan. Untuk membiayai beban Operasional perusahaan yaitu gaji, tunjangan, sewa gedung kantor PT.KI-Bolok dan biaya administrasi lainnya masih dibebankan sementara pada pos dana penyertaan modal.
- Pemerintah terus berupaya memberikan perhatian kepada PT KI-Bolok dalam meningkatkan kinerjanya.

3. PT. Flobamor

- Diharapkan PT Flobamor segera melakukan koordinasi dengan ASDP untuk menyelesaikan dispute Hutang Piutang dengan ASDP;
- PT Flobamor telah berupaya melakukan Koordinasi dan Evaluasi melalui surat resmi dan secara langsung berdiskusi dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI terkait skema pembayaran Subsidi Usaha bidang penyeberangan agar pelaksanaannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati;
- PT Flobamor berupaya untuk melakukan koordinasi dan sosialisasi bersama dengan Balai TNK dan pelaku pariwisata untuk tujuan menaikkan harga Tiket Jasa Pemanduan Wisata sebelumnya sebesar Rp. 120.000 dinaikan menjadi Rp. 225.000 dan sekaligus akan melakukan penerapan pembatasan pengunjung (daya dukung & daya tampung) di area Pulau Padar & Pulau Komodo;
- PT Flobamor telah mengajukan surat permohonan terkait pengelolaan Hotel Sasando untuk mengakhiri Kerja sama dan mengharapkan dukungan Pemerintah Provinsi NTT melakukan kegiatan di Hotel Sasando;
- PT Flobamor mengembalikan pengelolaan Kapal KMP Ile Boleng kepada Kementerian Perhubungan dan sampai saat ini masih menunggu keputusan dari Kementerian Perhubungan.

4. PT. BPD NTT

- Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan segera berkoordinasi dengan Staf Khusus Gubernur bidang Ekonomi untuk memfasilitasi PT BPD NTT beraudiens dengan Pj. Gubernur NTT terkait Modal Inti Minimum dimana sampai dengan bulan November 2023 mencapai Rp. 2,263 triliun. Kekurangan Modal Inti dari target Rp. 3 triliun di tahun 2024 sebesar Rp. 736 miliar;
- Pemerintah terus memberikan dukungan terhadap PT BPD NTT untuk mencapai modal inti minimum di Tahun 2024;
- Pemerintah memberikan apresiasi kepada PT BPD NTT melalui Programnya mendukung transformasi UMKM melalui Festival Desa Binaan Bank NTT dan Peduli UMKM (pendampingan, digitalisasi peningkatan kualitas dan inovasi).

BAB V PENUTUP

Demikian Laporan Evaluasi dan Pembinaan BUMD Sub Bagian BUMD Tahun Anggaran 2023, dan kiranya dengan dilakukan Evaluasi dan Pembinaan secara berkala maka diharapkan pengelolaan BUMD dapat dilakukan secara profesional sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik, mengarahkan dan mengendalikan BUMD agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan berkeselimbangan dengan harapan agar dapat meningkatkan kinerja BUMD dalam menghasilkan laba/profit perusahaan sehingga dapat berkontribusi terhadap PAD.

Kupang, 29 Desember 2023

Mengetahui

Pt. Kepala Biro Perekonomian
dan Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi NTT,



Drs. Alexander B. Koroh, MPM
Pembina Tk.I
NIP 197004271990031005

Penanggung Jawab Kegiatan
Koordinator Substansi
BUMD dan BLUD

Patrisia A.D Wea, SE
Pembina Tingkat I
NIP 196508081993032011